

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, M. H. (2017). Determinan Keberhasilan E-Filing Pajak di Indonesia: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2022, Februari 8). Pertahankan Momentum Pemulihan, Kemenkeu Melanjutkan PPN DTP Rumah di Tahun 2022: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/369>
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun 2020 s.d Semester I Tahun 2021*. Jakarta Pusat.
- Bappeda Kabupaten Tangerang. (2019). Profil Daerah Kabupaten Tangerang 2019. . Kabupaten Tangerang, Banten.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak*. Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2007). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-112/PJ/2007 Tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, Dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, Dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II*. Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-28/Pj/2021 Tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, Dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. Republik Indonesia.
- Haptari, D. V., & Aji, B. K. (2022). Dampak Kebijakan Insentif PPN DTP Rumah Terhadap Profitabilitas Perusahaan Sektor *Real Estate*. *Jurnal Pajak Indonesia*, 214-224.

- Hartini. (2009). Analisa Manfaat Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Tahun 2009 bagi Wajib Pajak.
- Indahsari, D. N., & Fitriandi, P. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi *Covid-19* Terhadap Penerimaan PPN.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *APBN Kita Edisi November 2021*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.010/2021 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021*.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.010/2021 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021*.
- Kementerian Keuangan. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022*.
- KPP Pratama Tigaraksa. (2022, Desember 9). Video Profil KPP Pratama Tigaraksa: https://www.youtube.com/watch?v=fuFTTI_AZ0c&t=35s
- Marlina, L. &. (2021). The Role of Government-borne Tax Incentives (DTP) in the *Covid 19* Pandemic Era. *Economy Deposit Journal (E-DJ)*, 2(2), <https://doi.org/10.36090/e-dj.v2i2.910>.
- Rahma, N. E. (2022). Transparansi Pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Pada Sewa Toko di Mal. *Jurist-Diction* Vol.5 (2).
- Rahmadi, Z. T., & Wahyudi, M. A. (2022). Implikasi KEHadiran Undang-Undang HPP dan Insentif Perpajakan Sehubungan *Covid 19* Terhadap Kewajiban Perpajakan Klaster PPN. *Jurnal Rekaman*, Vol.6.
- Salihatul Husna, F. U. (2022). Tinjauan Atas Pemanfaatan Insentif Pajak. Vol.2 No.2, 189-204.
- Sugiyono (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung:ALFABETA).
- Terry, G. R. (2000). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Refika Aditama.

Waluyo. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

Wijaya, S., & Arsini, K. R. (2021). Fasilitas Tidak Dipungut Atau Dibebaskan: Perbedaan Dan Permasalahan. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan pelayanan Publik* , Volume VIII Nomor 1.

Wildan, M. (20221, Oktober 8). *REI Minta Pemberian Insentif PPN DTP Rumah Dilanjutkan, Ini Alasannya*. DDTC News: <https://news.ddtc.co.id/rei-minta-pemberian-insentif-ppn-dtp-rumah-dilanjutkan-ini-alasannya-42549>